

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tata kelola pelaksanaan pemilu yang terdiri dari pra pemilu, periode pemilu dan pasca pemilu menggunakan perspektif *electoral integrity*. Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat kerawanan yang rendah menurut Badan Pengawas Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran pemilukada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui *indepth interview* dan kajian dokumentasi. Penelitian ini juga didukung melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemilukada di Kota Yogyakarta telah berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip *electoral integrity* yang diterapkan pada tahapan pelaksanaan pemilukada meliputi pra pemilu, proses pemilu dan pasca pemilu. Dalam penelitian ini tidak semua indikator digunakan untuk menganalisis tahapan penyelenggaraan pemilukada. Hal ini karena disesuaikan dengan hasil temuan penelitian dengan informasi yang didapat melalui beberapa narasumber. Beberapa faktor pendukung dari pelaksanaan tata kelola pemilukada yang berintegritas antara lain keterlibatan stakeholder dalam tahapan pemilukada, inovasi dalam pemberian sosialisasi dan informasi pemilih, distribusi logistik yang lancar serta terbukti tidak dilakukan dugaan kode etik oleh KPU Kota Yogyakarta dan PPK. Selain itu faktor penghambatnya antara lain 31 % penghematan dana seharusnya digunakan untuk optimalisasi sosialisasi. Sementara untuk informasi pemilih seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SIDALIH, serta dalam proses pemungutan suara koordinasi antar penyelenggara Pemilu belum maksimal.

Kata Kunci : pemilukada, *electoral integrity*, KPU Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of electoral governance which consists of pre-election, election period and post-election within electoral integrity perspective. The city of Yogyakarta has a low level of vulnerability according to the Election Supervisory Agency. However, in practice there are several violations election. This research uses qualitative descriptive approach through in-depth interview and documentation study. The results of this study indicate that electoral governance in Yogyakarta City has integrity in accordance with the principles of electoral integrity applied in the stages of election implementation include pre-election, election process and post-election. In this study, not all indicators are used to analyze the stages of organizing the election. This is because adjusted with the findings of research with information obtained from several sources. Several supporting factors from the implementation of electoral governance that have integrity include stakeholder involvement in election stage, innovation in giving socialization and voter information, smooth logistic distribution and proven not to be suspected code of ethics by Electoral Commission of Yogyakarta. In addition, the inhibiting factors, among others, 31% savings of funds should be used for optimization of socialization. As for voter information should be able to increase public awareness to take advantage of SIDALIH, and in the process of voting coordination between election organizers have not been maximized.

Keywords: *election, electoral integrity, Electoral Commission of Yogyakarta, Electoral Supervisory Committee of Yogyakarta*